

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

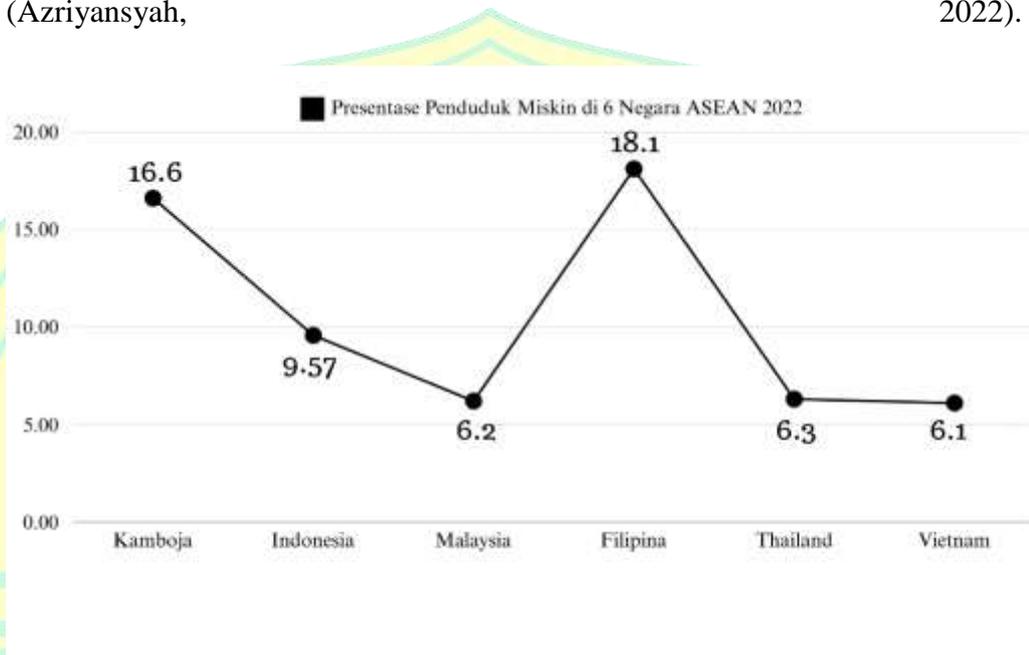
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan gerakan inisiatif pembangunan berkelanjutan yang ditargetkan untuk dicapai oleh negara-negara anggota PBB di tahun 2030. Tujuan utama yang ingin dicapai yaitu meniadakan kemiskinan dimanapun, karena untuk mencapai kesejahteraan, masyarakat harus keluar dari kondisi miskin (United Nations, 2022). Namun, kondisi saat ini khususnya di negara berkembang masih jauh dari kondisi ideal untuk meniadakan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah makro ekonomi yang dialami kebanyakan negara berkembang termasuk negara-negara di ASEAN. Hal ini didukung data dari *World Bank* bahwa 10 dari 11 negara anggota ASEAN masih masuk kategori negara berkembang. Artinya negara tersebut masih memiliki pendapatan dibawah US\$ 13,845. Pendapatan yang rendah membuat seseorang sulit mengakses berbagai fasilitas untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemiskinan menghambat proses pembangunan ekonomi dan membuat negara tersebut masuk dalam kategori negara berkembang (Islami & Anis, 2019).

ASEAN adalah sebuah organisasi yang beranggotakan negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Secara umum, kondisi masyarakat di negara-negara anggota ASEAN masih menghadapi masalah kemiskinan. Berdasarkan data dari *World Economic Outlook* yang dirilis IMF pada Oktober 2023, hanya ada dua negara ASEAN yang memiliki pendapatan perkapita di atas US\$13,845 atau setara dengan negara maju. Negara tersebut yaitu Singapura dengan pendapatan perkapita US\$87,9 ribu dan Brunei Darussalam dengan pendapatan perkapita US\$34,4 ribu. Kemudian negara Laos, Timor Leste, dan Myanmar memiliki pendapatan perkapita paling rendah jika dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Kondisi ini akan sejalan dengan tingkat kemiskinan di negaranya.

Merujuk data dari Goodstats (2023), pada tahun 2023 Singapura dan Brunei Darussalam memiliki angka kemiskinan terendah jika dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya. Singapura memiliki presentase kemiskinan 1% dan Brunei Darussalam memiliki presentase kemiskinan 3%. Kemudian negara Laos memiliki presentase kemiskinan 18,3%, Myanmar presentase kemiskinannya 40%, dan Timor Leste tidak ditemukan datanya. Singapura dan Brunei Darussalam menjadi negara dengan kemiskinan terendah pertama dan kedua di ASEAN, sedangkan Laos dan Myanmar menjadi negara dengan kemiskinan tertinggi pertama dan kedua di ASEAN.

Menurut BPS kemiskinan merupakan keadaan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar seseorang, baik yang berupa makanan ataupun selain makanan. Kemiskinan terjadi akibat berbagai faktor, termasuk tingkat inflasi, kualitas

manusia, korupsi, dan banyaknya penduduk (Samputra & Munandar, 2019). Kemiskinan juga disebabkan oleh laju PDRB dan tingkat pengangguran (Azriyansyah, 2022).



Gambar 1.1 Data Masyarakat Miskin dalam Presentase di 6 Anggota ASEAN 2022

Sumber : (ASEANStats, 2022)

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa kemiskinan di enam negara anggota ASEAN lainnya memiliki angka yang masih tinggi jika dibandingkan tujuan SDG's. Vietnam memiliki kemiskinan terendah dari enam negara ini dengan presentase 6,1%. Kemudian disusul Malaysia dengan 6,2%, Thailand dengan 6,3%. Indonesia berada pada urutan keempat dengan presentase kemiskinan 9,57%, disusul Kamboja 16,6% dan kemiskinan terendah ada di negara Filipina dengan presentase 18,1%.

Trend kemiskinan di negara ASEAN jika dibandingkan negara maju masih jauh tertinggal. Berdasarkan data *world bank* yang dikutip dari Macrotrends

(2023) negara maju memiliki angka kemiskinan dibawah 1%. Misalnya Denmark pada tahun 2020 tingkat kemiskinannya 0.40%, Firlandia pada tahun 2020 tingkat kemiskinannya 0.10%, Norwegia tahun 2023 tingkat kemiskinannya 0.48%. Kemudian jika dibandingkan negara Singapura dan Brunei Darussalam angka kemiskinannya jauh berbeda. Singapura dan Brunei Darussalam termasuk negara yang sudah bebas dari masalah kemiskinan dan masuk pada kategori negara maju.

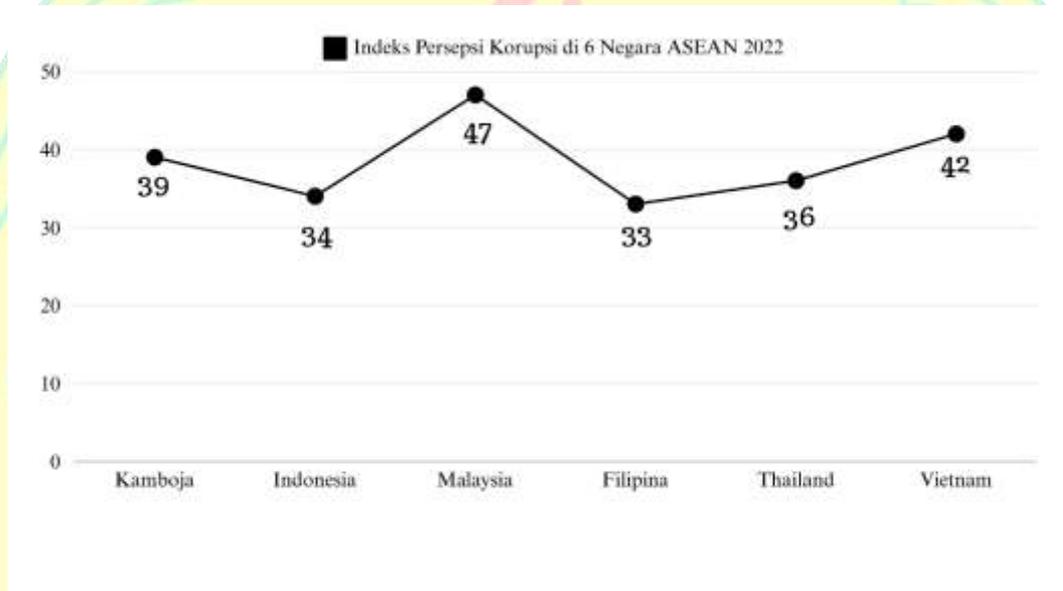
Masalah kemiskinan tidak bisa dianggap rendah dan harus terus menjadi perhatian pemerintah. Fenomena ini terjadi karena adanya implikasi yang signifikan dari masalah kemiskinan terhadap kualitas hidup individu yang terkena dampaknya. Masalah kemiskinan berdampak pada tingkat penyakit yang tinggi, kematian yang tinggi, ketidakmampuan mengakses berbagai fasilitas, gizi buruk, dan akhirnya menyebabkan kematian (Rowley et al., 2021).

Kemiskinan juga menjadi masalah yang harus diperhatikan karena setiap negara pasti menginginkan terciptanya keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya. Kemiskinan memunculkan beragam masalah sosial seperti pemukiman kumuh, putus sekolah, meningkatnya kriminalitas, dan rendahnya daya beli masyarakat (Leonita & Sari, 2019). Sejalan dengan tujuan SDGs 2030 yang salah satunya ingin meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat melalui peniadaan kemiskinan, maka masalah kemiskinan harus menjadi perhatian setiap negara, termasuk negara negara di ASEAN.

Kemiskinan dapat terjadi karena berbagai faktor. Kemiskinan dapat disebabkan oleh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka, serta jumlah penduduk suatu wilayah (Sari, 2021). Kemiskinan juga dipengaruhi oleh kondisi kesehatan masyarakat, tingkat pendidikan, dan besaran upah minimum yang berlaku (Chairunnisa & Qintharah, 2022). Kemiskinan dipengaruhi oleh PDRB dan jumlah penduduk (Damanik & Sidauruk, 2020). Selanjutnya, tingkat kemiskinan juga terpengaruh oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, penyediaan air bersih, dan rata-rata jumlah individu yang tergabung dalam keluarga (Adhitya et al., 2022). Selain itu masalah kemiskinan hanya akan mampu teratasi jika seluruh pihak berkontribusi mengatasinya (Halim & Arsyad, 2021). Pemerintah dapat berkontribusi melalui kebijakan yang dibuat dengan amanah tanpa praktik korupsi. Masyarakat juga turut berkontribusi dengan memberikan bantuannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian masyarakat miskin tersebut juga harus melakukan usaha peningkatan kualitas dirinya sehingga dapat mengeluarkan mereka dari kondisi kemiskinan.

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dalam negara memiliki kekuatan untuk membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan melalui berbagai kebijakannya. Sebagai contoh, pemerintah melalui penganggaran APBN dapat mengalokasikan untuk menyediakan bantuan sosial kepada masyarakat yang berada dalam kondisi kemiskinan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi rencana bantuan seringkali tidak

selalu sampai ketujuannya. Hal ini karena masih adanya budaya korupsi oleh para pejabat tersebut. Korupsi menghambat kemajuan pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, sehingga menurunkan minat investor untuk berinvestasi. Akibatnya, terjadi penurunan lapangan kerja dan meningkatnya tingkat kemiskinan (Gumala & Anis, 2019).



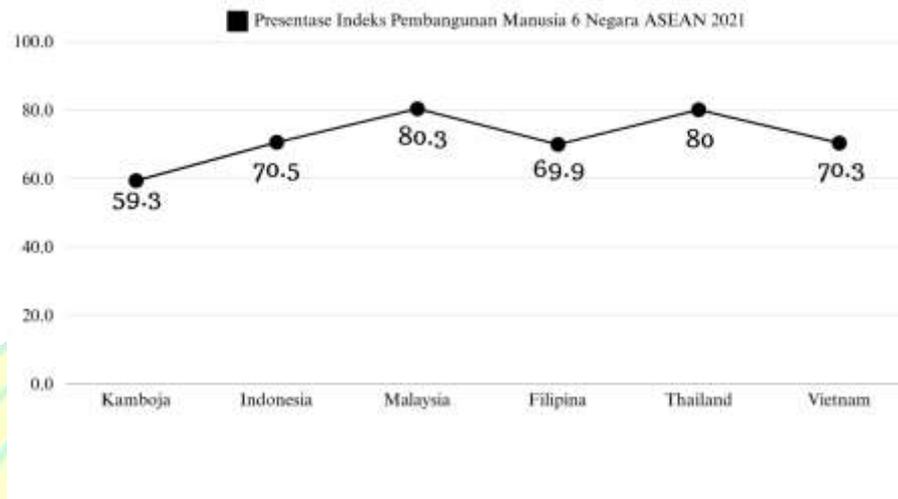
Gambar 1.2 Indeks Persepsi Korupsi di 6 Negara ASEAN 2022

Sumber : (Transparency International, 2021)

Merujuk data pada tahun 2022 tingkat korupsi di negara ASEAN jika diukur dengan indeks persepsi korupsi masuk pada kategori tinggi. Negara dengan korupsi terendah dari keenam negara tersebut yaitu Malaysia. Kemudian disusul Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Negara dengan korupsi tertinggi yaitu di negara Filipina dan Kamboja. Angka indeks ini masih jauh dari Singapura yang memiliki skor indeks 85 dan angka kemiskinan 1%.

Secara global tingkat korupsi di negara ASEAN masih tinggi, bahkan mayoritas negara ASEAN memiliki kategori menengah bawah cenderung korupsi. Menurut laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) kerugian yang dialami negara pada tahun 2022 sebesar Rp42,747 triliun akibat tindakan korupsi. Korupsi menyebabkan kerugian bagi negara dan juga merugikan masyarakat secara luas. Korupsi membuat ketersediaan dana untuk menyediakan fasilitas ekonomi dan sosial bagi masyarakat berkurang, akibatnya pemerintah tidak mampu menyediakan fasilitas sosial yang kemudian akan memperburuk tingkat kemiskinan (Balogun, 2022). Hal ini juga didukung fakta bahwa negara yang tingkat kemiskinannya dibawah 1% seperti Denmark, Firlandia, dan Norwegia merupakan negara yang memiliki peringkat tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi dunia (Transparency International, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah indikator yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan masyarakat dalam aspek umur panjang, lama sekolah, dan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi mencerminkan kapasitas masyarakat dalam mengakses sumber daya yang mendukung pertumbuhan ekonomi (Masdi et al., 2023). Kemampuan masyarakat mengakses sumber tersebut akan mampu menurunkan tingkat kemiskinan.



Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia di 6 Negara ASEAN 2021

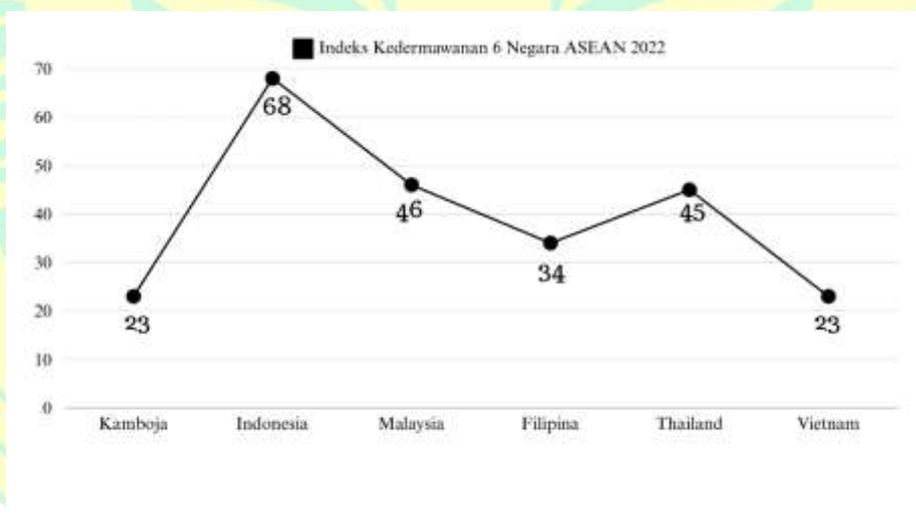
Sumber : (ASEANStats, 2022)

Berdasarkan data kualitas masyarakat negara anggota ASEAN yang diukur dengan indeks pembangunan manusia. Keenam negara ASEAN ini memiliki skor pada kategori kualitas sangat tinggi dan tinggi. Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam memiliki skor indeks kategori sangat tinggi. Kemudian Filipina dan Kamboja memiliki skor indeks tinggi. Namun jika dibandingkan dengan Singapura yang memiliki skor indeks 93 dan Brunei Darussalam yang memiliki skor indeks 82, tentu masih tertinggal jauh. Namun enam negara ini masih memiliki potensi untuk mencapai kemiskinan 0% jika dibandingkan Laos, Timor Leste, dan Myanmar.

Namun, angka indeks enam negara ASEAN jika dibandingkan dengan negara lainnya masih rendah. Jika dilihat Malaysia dengan indeks tertinggi ketiga hanya menduduki peringkat ke-62 dari 191 negara. Melihat kondisi tersebut perlu peran dari berbagai pihak untuk meningkatkan IPM yang

merupakan gambaran dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut Arsyad dalam Sinaga (2020), menyatakan bahwa peningkatan IPM bisa menjadi strategi untuk menurunkan kemiskinan.

Mengatasi masalah kemiskinan jika hanya melibatkan peran pemerintah akan sulit dan memakan waktu yang lama, sehingga diperlukan juga peran dari sesama masyarakat. Kemurahan hati seseorang untuk memberi kepada orang yang tidak dikenal ternyata sudah menjadi hal biasa pasca pandemi. Menurut laporan dari *Charities Aid Foundation* bahwa Indeks Kedermawanan yang merupakan pengukuran dari kedermawanan seseorang meningkat setelah pandemi.



Gambar 1.4 Indeks Kedermawanan di 6 Negara ASEAN 2022

Sumber : (Charities Aid Foundation, 2022)

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2022 indeks kedermawanan negara-negara di ASEAN sangat beragam. Indonesia menduduki peringkat pertama bahkan sedunia dengan indeks 68. Kemudian

urutan kedua diduduki oleh Malaysia dengan angka indeks 46. Peringkat terakhir diduduki oleh Kamboja dan Vietnam dengan angka indeks 23. Rendahnya indeks kedermawanan di Kamboja sejalan dengan tingginya tingkat kemiskinan di negara tersebut.

Selain itu berdasarkan data dari *Charities Aid Foundation* (2022) negara yang memiliki tingkat kemiskinan rendah seperti Denmark, Firlandia, dan Norwegia memiliki indeks kedermawanan yang cukup tinggi. Hal ini karena pemberian yang dilakukan untuk pihak yang membutuhkan akan membantu mereka keluar dari kemiskinan (Habib et al., 2008). Peningkatan indeks ini menggambarkan kepedulian masyarakat kepada sesama sehingga penurunan angka kemiskinan tidak hanya diupayakan oleh pemerintah tetapi juga sesama masyarakat, diharapkan dengan begini akan cepat terwujud menurunnya angka kemiskinan.

Berdasarkan data dan kondisi yang ada, keenam negara ASEAN, yaitu Indonesia, Kamboja, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, memiliki potensi untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan hingga mencapai tingkat 0%. Sedangkan dua negara ASEAN lainnya yaitu Singapura dan Brunei Darussalam sudah memiliki presentase angka kemiskinan yang rendah. Kemudian tiga negara anggota lainnya yaitu Laos, Timur Leste, dan Myanmar masih jauh dari kondisi ideal kemiskinan 0% sehingga sulit untuk diupayakan. Sehingga dalam

penelitian ini, peneliti mengambil fokus penelitian pada enam negara ASEAN yaitu Vietnam, Thailand, Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Malaysia.

Melihat skor indeks persepsi korupsi keenam negara ASEAN yang mayoritas masih rendah, angka indeks pembangunan berada pada kategori sangat tinggi dan tinggi, serta ada potensi pada kedermawanan yang tinggi menjadi menarik untuk dikaji lebih dalam terkait seperti apa dampaknya terhadap kemiskinan. Dengan demikian dari uraian serta data data yang telah dipaparkan diatas, penulis mengambil judul **Pengaruh Perilaku Korupsi, Pembangunan Manusia, dan Kedermawanan terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN**. Peneliti menggunakan indeks persepsi korupsi untuk mengukur perilaku korupsi, menggunakan indeks pembangunan manusia sebagai pengukur pembangunan manusia, serta menggunakan indeks kedermawanan untuk mengukur kedermawanan. Dalam penelitian ini, fokus penelitian difokuskan pada keenam negara tersebut, yaitu Vietnam, Thailand, Indonesia, Kamboja, Filipina, dan Malaysia, karena meskipun masih menghadapi tantangan kemiskinan, keenam negara tersebut memiliki potensi untuk mencapai tingkat kemiskinan yang mendekati nol.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Mengacu latar belakang tersebut, beberapa yang dapat menjadi pertanyaan penelitian dapat diidentifikasi antara lain:

1. Apakah terdapat pengaruh Perilaku Korupsi terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN?
2. Apakah terdapat pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN?
3. Apakah terdapat pengaruh Kedermawanan terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN?
4. Apakah terdapat pengaruh Perilaku Korupsi, Pembangunan Manusia, dan Kedermawanan terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pertanyaan penelitian sebelumnya, penulis dapat merumuskan hal yang bisa menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk memahami dan mengetahui pengaruh Perilaku Korupsi terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN
2. Untuk memahami dan mengetahui pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN
3. Untuk memahami dan mengetahui pengaruh Kedermawanan terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN
4. Untuk memahami dan mengetahui pengaruh Perilaku Korupsi, Pembangunan Manusia, dan Kedermawanan terhadap Kemiskinan di Negara ASEAN

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, secara teoritis ataupun praktis, adalah sebagai ini:

1. Kontribusi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terkait indeks persepsi korupsi, indeks pembangunan manusia, indeks kedermawanan, dan kemiskinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pengaruh perilaku korupsi, pembangunan manusia, dan kedermawanan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan teori dan pemahaman dalam bidang pengentasan kemiskinan serta faktor-faktor yang memengaruhinya.
2. Secara praktis, diharapkan untuk pemangku kebijakan dapat membuat kebijakan yang mengarah pada penurunan kemiskinan, pemberantasan korupsi, dan peningkatan kesejahteraan manusia.